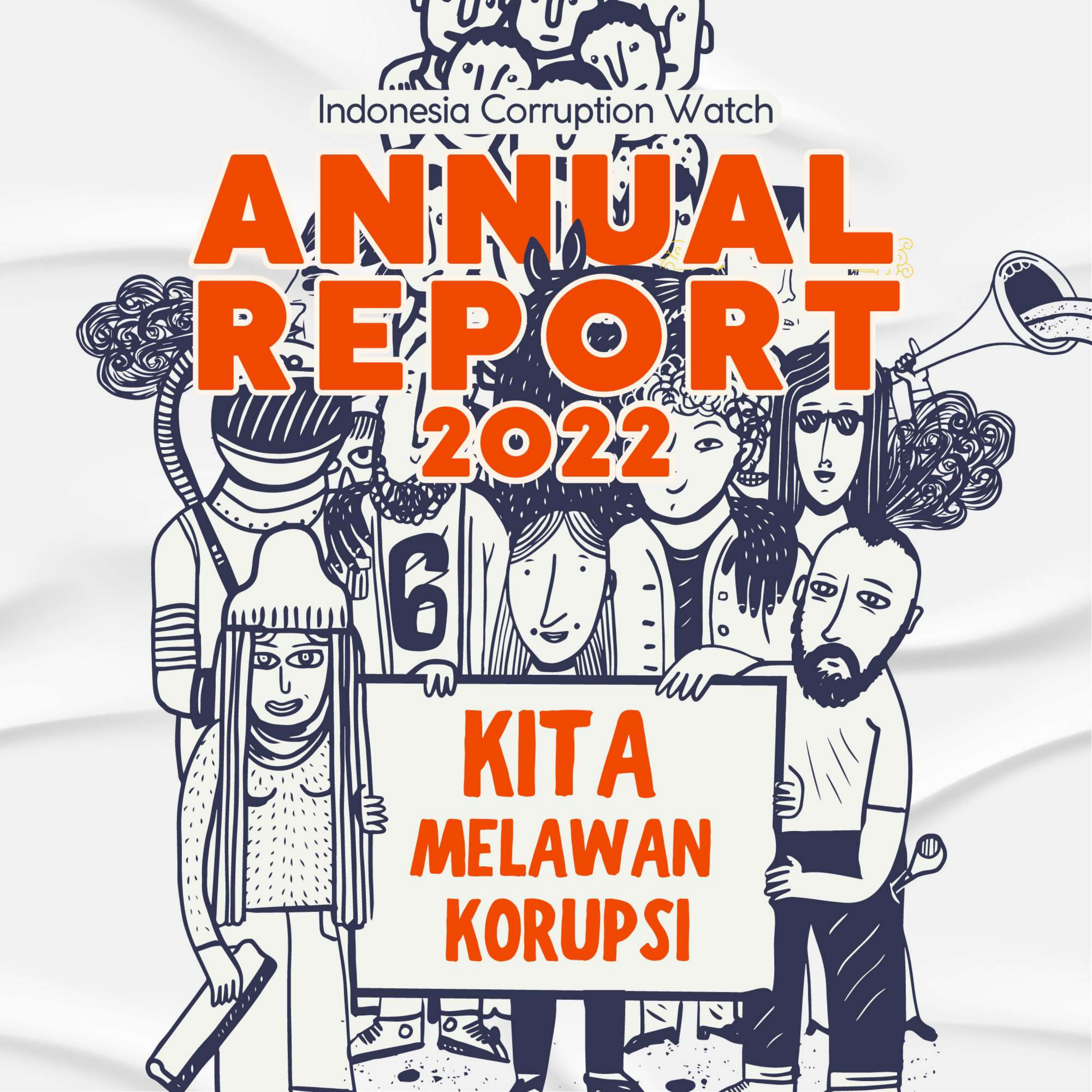




Indonesia Corruption Watch

# ANNUAL REPORT 2022

**KITA  
MELAWAN  
KORUPSI**



## 1. KATA PENGANTAR

# KEMBALI KE TITIK NOL

Awal tahun 2023 Pemerintah Jokowi kembali mendapat kado buruk soal pemberantasan korupsi dimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi skor 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan TI Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.

Menurunnya IPK Indonesia merupakan kali kedua dimasa Pemerintahan Jokowi, sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2020 dimana perolehan skor IPK merosot menjadi skor 37 dari skor 40 di tahun 2019. Sempat IPK naik kembali di tahun 2021 namun kembali terjun bebas tahun 2022. Itu berarti perkembangan peringkat korupsi Indonesia di era Jokowi bisa dikatakan kembali ke titik nol, karena posisi peringkatnya sama dengan diawal pemerintahannya tahun 2014.

Situasi ini tak terlalu mengejutkan karena komitmen Jokowi







terhadap pemberantasan korupsi memang semakin surut. Hal ini terefleksi dari prioritas kerja Presiden 2019-2024 yang tidak lagi menyinggung soal pemberantasan korupsi. Berbeda sekali dengan agenda Nawacita yang diusung pada awal jabatannya dimana secara detail disebutkan “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”.

Surutnya prioritas kerja terhadap pemberantasan korupsi pada akhirnya terkonfirmasi ketika terjadi revisi UU KPK dan rekayasa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai KPK. Langkah berani yang diharapkan lahir dari Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menyelamatkan KPK akhirnya tak pernah hadir. Bahkan temuan Ombudsman tentang adanya maladministrasi dalam TWK juga tak membuat Jokowi membatalkan TWK.

Siapa menabur angin, akan menuai badai, menjadi pepatah yang paling tepat untuk menggambarkan lemahnya komitmen antikorupsi Presiden, membiarkan maraknya potensi konflik kepentingan dan rangkap jabatan pejabat publik, aparatur birokrasi dengan rekening gendut baik di pusat dan daerah. Bahkan belakangan terbongkar kasus korupsi proyek startegis nasional BTS 4G yang melibatkan Menkominfo Jhonny G Plate sebagai tersangka.



Maka tak heran jika persepsi masyarakat internasional kepada Indonesia sebagai salah satu negara terkorup menguat kembali.

Pada sisi lain aparatur penegak hukum justru mempertontonkan lemahnya integritas, misalnya saja pengunduran diri Lili Pintauli sebagai wakil komisioner KPK karena diduga kuat menerima gratifikasi dari BUMN untuk menonton gelaran Moto GP Mandalika, serta terjeratnya hakim agung dalam kasus jual beli perkara.

Ironisnya rancangan UU Perampasan Aset yang telah menjadi program legislasi nasional serta sudah dikirimkan ke DPR justru tidak jelas kabarnya. Pemenuhan dan perlindungan hak sipil juga semakin mengkhawatirkan, fenomena *hacking* dan *doxing* terhadap aktivis masih terjadi. Bahkan jurnalis dan staf Narasi TV masih mengalami peretasan dan tak jelas penanganan hukumnya. Kriminalisasi Haris dan Fatia serta yang paling miris tentu hilangnya nyawa PNS di Semarang, Jawa Tengah yang diduga karena statusnya sebagai saksi korupsi.

Realitas pemberantasan korupsi dan persepsi masyarakat internasional yang memburuk membutuhkan terobosan yang radikal, efektif dan efisien. Nah apakah upaya Menkopolhukam membentuk Tim Reformasi Hukum dapat menjadi jawaban atas realitas tersebut? Semoga tidak dijadikan tameng atas komitmen sekedarnya pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.









# LAPORAN AKHIR TAHUN 2022

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Jl. Kalibata Timur 4D No.6 Kalibata, Jakarta Selatan

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konten    | : Tim ICW                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Foto      | : Dokumentasi ICW, Kompas                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Layout    | : Fitriayana Sasmita                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Telp      | : 021-7901885 / 7994015                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fax       | : 021-7994005                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Website   | : <a href="http://www.antikorupsi.org">www.antikorupsi.org</a><br>: <a href="http://www.opentender.net">www.opentender.net</a><br>: <a href="http://www.akademi.antikorupsi.org">www.akademi.antikorupsi.org</a><br>: <a href="http://www.rekamjejak.net">www.rekamjejak.net</a> |
| E-mail    | : <a href="mailto:icw@antikorupsi.org">icw@antikorupsi.org</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Twitter   | : @sahabaticw<br>: @antikorupsi                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Facebook  | : Sahabat ICW                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Instagram | : @sahabaticw                                                                                                                                                                                                                                                                    |





DAFTAR ISI

02 Kata Pengantar

11 Memperkuat Kapasitas Organisasi

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 Penguatan Aturan Kelembagaan                                      | ....12 |
| 3.2 Peningkatan Kesejahteraan                                         | ....13 |
| 3.3 Menjaga Independen Melalui Dukungan Publik                        | ....14 |
| 3.3.1 Penggalangan Donasi Melalui Program Pengawasan Anggaran Sekolah | ....14 |
| 3.3.2 Koperasi dan Investasi                                          | ....19 |
| 3.3.3 Kolaborasi dan Sponsor dari Sektor Swasta                       | ....19 |
| 3.3.4 Bisnis Sosial Uncorrupted                                       | ....20 |

08 Pendahuluan

22 Membangun Jejaring Antikorupsi

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| 4.1 Perempuan Melawan Korupsi                     | ....23 |
| 4.2 Penguatan Antikorupsi di Sekolah              | ....24 |
| 4.3 Kerja Sama Akademi Antikorupsi dengan LLDIKTI | ....26 |
| 4.4 Hari Antikorupsi Sedunia                      | ....29 |
| 4.5 Kolaborasi Seni Lawan Korupsi                 | ....30 |
| 4.6 Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) | ....31 |

34 Advokasi Kebijakan Antikorupsi

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.1 Praktik Lancung Dana BOP Pesantren di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten | ....35 |
| 5.2 Digitalisasi Sebagai Instrumen Pengawasan Warga                                                          | ....37 |
| 5.3 Penguatan Peran Inspektorat dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan                                        | ....38 |
| 5.4 Laporan Maladministrasi Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah                                               | ....41 |

42 Penghargaan ICW





# 2. PENDAHULUAN

Tahun 2022 merupakan fase penting bagi proses regenerasi di ICW, mengingat siklus 4 tahunan untuk pergantian kepemimpinan harus dilakukan sesuai aturan organisasi perkumpulan ICW. Untuk itu tepatnya 19 September 2022, dilakukan Rapat Tahunan Anggota Perkumpulan. Berdasarkan rapat tersebut Anggota Perkumpulan akhirnya memilih dan menetapkan Agus Sunaryanto sebagai Koordinator Anggota Badan Pekerja menggantikan Adnan Topan Husodo yang telah memimpin ICW selama 2 Periode.

Selain pemilihan koordinator baru ICW, Rapat Anggota Perkumpulan juga mengesahkan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan serta struktur baru perkumpulan dengan memilih dan menetapkan Sely Martini sebagai Ketua Badan Pengurus Perkumpulan ICW dan Emerson Yuntho sebagai Ketua Badan Pengawas Perkumpulan ICW.

Perubahan struktur perkumpulan ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi seluruh fungsi





**Adnan Topan Husodo**

kontrol (*check and balances*) agar organisasi ICW semakin responsif terhadap perubahan, demokratis, transparan dan akuntabel.

Secara paralel menuju proses suksesi, ICW juga melakukan evaluasi rencana strategis 2018-2022 dengan melibatkan evaluator eksternal. Setelah dokumen evaluasi renstra dihasilkan kemudian dilakukan workshop rencana strategis di bulan Desember 2022 dan akhirnya dihasilkan dokumen rencana strategis 2022-2026.

Siklus kerja organisasi terus berlanjut di tahun 2023 dengan diselenggarakan rapat kerja pada Januari 2023, dimana rapat kerja ini menjadi turunan praktis dari dokumen renstra 2022-2026 untuk dijadikan rencana kerja tahunan. Hasil Raker tersebut menjadi panduan kerja ICW selama tahun 2023.

Kemudian untuk semakin memperkuat formasi baru, ICW mendapat dukungan dari tim Remdec yang bertugas untuk mengasistensi tiga agenda prioritas. Pertama, mereview struktur kelembagaan badan pekerja ICW. Review ini menjadi penting untuk menguji efektifitas kerja divisi, fungsi koordinasi serta urgensi kebutuhan fungsi baru sesuai kebutuhan hasil rencana strategis 2022-2026.

Pergantian Koordinator ICW  
Sumber: Dokumentasi ICW



Kedua, mengasistensi peningkatan finansial lembaga melalui pengembangan kegiatan bisnis sosial dan usaha-usaha lain untuk memperkuat daya tahan keuangan ICW. Ketiga, menyusun panduan anggaran pendapatan dan belanja organisasi ICW yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan, pelaksanaan dan capaian rencana strategis ICW berbasis dari pendapatan berbagai sumber serta pengeluaran anggaran untuk kepentingan kesejahteraan, riset dan advokasi.

Diluar penguatan manajemen organisasi tersebut juga secara paralel dilakukan perbaikan sistem yang mendukung kerja organisasi diantaranya perbaikan piranti lunak (*software*) sistem manajemen pelaporan keuangan ICW (MIS Bersih), digitalisasi laporan keuangan serta perbaikan sistem remunerasi dan kesejahteraan anggota badan pekerja dengan mengikutsertakan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian untuk memperkuat posisi ICW sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami telah menginisiasi pertemuan konsolidasi masyarakat sipil pada bulan November 2022. Pertemuan ini dilakukan untuk menyikapi tahun politik baik posisi, sikap dan peran serta masyarakat sipil yang akan dibawa kepada para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024.

Tentu tak kalah penting adalah keberadaan kantor baru ICW yang akan menjadi Rumah Belajar Anti Korupsi, sebuah sarana bagi masyarakat sipil terutama pemuda dan mahasiswa untuk belajar bersama, mencari inovasi baru pencegahan korupsi.





**3.**

**MEMPERKUAT**  
 **KAPASITAS**  
**ORGANISASI**



Sepanjang tahun 2022, ICW terus berupaya memperkuat akuntabilitas tata kelola organisasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, fungsi kontrol (*check and balances*) diantara organ-organ Perkumpulan, menyusun panduan teknis bagi setiap anggota badan pekerja dalam menjalankan seluruh aktifitas. Termasuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan setiap anggota baik kesehatan fisik maupun psikis.

### 3.1 PENGUATAN ATURAN KELEMBAGAAN

Untuk merealisasikan upaya penguatan tersebut adalah dengan menyusun serta memperbaiki aturan internal organisasi.

1

Memperbaiki beberapa prosedur teknis kerja organisasi atau Standar Operating Prosedur (SOP) diantaranya SOP Keamanan Holistik yang mengatur pengamanan fisik maupun digital baik lingkup internal dan eksternal. Membuat SOP baru terkait Penerimaan Laporan Masyarakat, yang mengatur alur penanganan laporan pengaduan dari masyarakat serta pengelolaan dokumen pendukung. Terakhir SOP Pengelolaan Perpustakaan yang akan mengatur peluang bagi masyarakat mengakses buku atau produk pengetahuan antikorupsi dari ICW atau sumber lain.

2

Melakukan revisi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Revisi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi Badan Pengawas dan Badan Pengurus dalam rangka mengawasi dan memberi arahan kepada Badan Pekerja ICW.



3

Melakukan revisi Kode Etik Perkumpulan dan Badan Pekerja. Perbaikan ini dilakukan untuk memperjelas norma-norma yang berlaku dan harus diikuti oleh anggota perkumpulan maupun Badan Pekerja ICW.

## 3.2 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Kami menyadari kerja-kerja advokasi yang dilakukan seringkali menempatkan anggota ICW dalam situasi penuh tekanan. Disisi lain, terdapat faktor “X” seperti Pandemi Covid-19 pada 2020-2022 yang ternyata berdampak pada kesehatan jasmani termasuk kesehatan mental bagi staf ICW. Oleh karena itu sebagai respon atas situasi tersebut, sejak 2022 ICW bekerja sama dengan Yayasan Pulih menyediakan akses konseling gratis kepada setiap anggota ICW yang dapat digunakan kapanpun.

Sedangkan untuk melindungi secara kesehatan jasmani, selain menanggung *medical reimburse* setiap anggota ICW untuk rawat jalan, rawat inap melalui asuransi swasta, juga sejak tahun 2021 sudah mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.





## **3.3 MENJAGA INDEPENDENSI MELALUI DUKUNGAN PUBLIK**

Upaya yang terus ICW lakukan untuk memperluas kerja-kerja antikorupsi adalah dengan melibatkan publik berdonasi. Korupsi dalam perspektif yang lebih luas tidak hanya merugikan uang negara tetapi juga berdampak pada hilangnya hak warga untuk menikmati manfaat atas penggunaan uang negara untuk pembangunan fasilitas publik yang bermutu.

Setiap donasi yang terkumpul akan digunakan kembali untuk kepentingan warga yang menjadi korban korupsi. Saat ini, pendekatan Divisi Penggalangan Dukungan Publik ICW fokus pada menghimpun dukungan warga melalui beberapa program advokasi publik. Salah satu pendekatan yang dilakukan ICW yaitu:

### **3.3.1 PENGKALANGAN DONASI MELALUI PROGRAM PENGAWASAN ANGGARAN SEKOLAH**

Pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan merupakan prasyarat untuk mewujudkan demokratisasi di sekolah sebagai unit terkecil pendidikan.

Untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas warga sekolah terutama orang tua murid dan guru agar memahami dan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dalam membiayai program/ kegiatan prioritas dan sesuai kebutuhan warga sekolah.







Pendampingan orang tua siswa, komite sekolah dan guru SDN 05 Kampung Sawah  
Sumber : Dokumentasi ICW

Oleh karena itu selama tahun 2022, ICW bersama Komite Pemantau Legislatif (KOPEL Bogor) melakukan pendampingan terhadap orang tua siswa, komite sekolah dan guru di SDN 05 Kampung Sawah, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai kontribusi untuk mendorong pendidikan yang berkualitas dengan tetap mengedepankan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Selain pendampingan di sektor pendidikan, kami juga mendorong upaya litigasi melalui mekanisme pemulihan korban korupsi sebagai respon atas kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan pejabat di Kementerian Sosial dan korupsi minyak goreng di Kementerian Perdagangan.



**Advokasi pemulihan korban merupakan usaha untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang terdampak dari kejahatan korupsi.**

**Langkah ini juga merupakan terobosan untuk menciptakan mekanisme jalur hukum bagi korban korupsi untuk memperberat hukuman bagi koruptor.**





"HAKIM SIDANG JULIARI TERIMA PERMOHONAN GANTI RUGI BANSOS"

INI ADA PERMOHONAN, AKAN KAMI PROSES, SILAHKAN LENGKAPI DOKUMEN-DOKUMENNYA DULU.

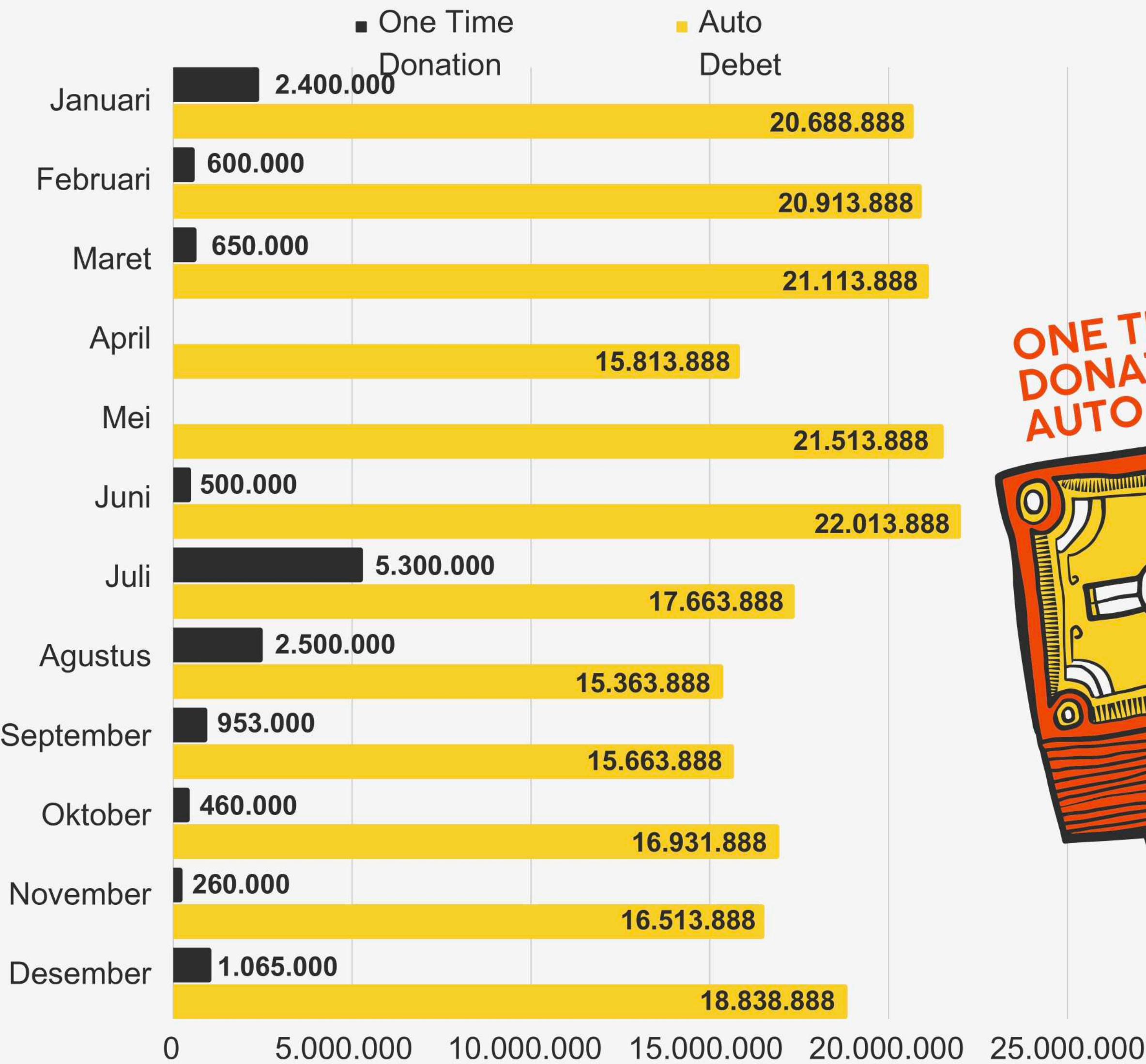
AKHIRNYA YAH, INI PERTAMA KALI LOH GUGATAN KORUPTOR GANTI RUGI KE KORBAN DITERIMA



Konten kampanye petisi ganti rugi korban korupsi Bantuan Sosial  
Sumber: changeorg\_id



Selama tahun 2022, kegiatan penggalangan donasi ICW berhasil mengumpulkan dukungan sebesar Rp 237.722.656. Detail dukungan setiap bulan dapat dilihat dalam grafik berikut.



ONE TIME  
DONATION &  
AUTO DEBET





### 3.3.2 KOPERASI DAN INVESTASI

Investasi merupakan terobosan baru yang diupayakan ICW dalam mengembangkan ketahanan keuangan lembaga. Investasi menjadi pilihan untuk mempertahankan nilai mata uang simpanan lembaga agar tidak tergerus oleh inflasi. Jenis Investasi yang dipilih dengan resiko terkecil (aman) namun tetap menyumbangkan pemasukan bagi lembaga. Jenis investasi yang dipilih antara lain :

1. Obligasi, berkontribusi pemasukan sebesar Rp.59.591.920 yang tercatat pada laporan pendapatan donasi PDP 2022
2. Koperasi, berkontribusi pemasukan sebesar Rp.197.400.000 yang tercatat pada laporan pendapatan Donasi PDP 2022

### 3.3.3 KOLABORASI DAN DUKUNGAN DARI SEKTOR SWASTA

Menggalang dukungan dari sektor swasta agar terlibat dalam kegiatan antikorupsi juga terus dilakukan. Tujuan utama dari kegiatan ini tentu bukan untuk menambah pemasukan bagi ICW tetapi lebih pada ajakan kepada sektor swasta untuk terlibat membiayai (*sponsorship*) kegiatan-kegiatan antikorupsi yang dilaksanakan ICW.

Pada tahun 2022, kami menggandeng BRI, PT SMI dan PT Visi Integritas untuk mendukung pembiayaan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) dan kegiatan Gagasan Antikorupsi Alumni SAKTI (GAAS!). Total dukungan yang diperoleh dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp 185.000.000 (Seratus Delapan puluh Lima Juta Rupiah)

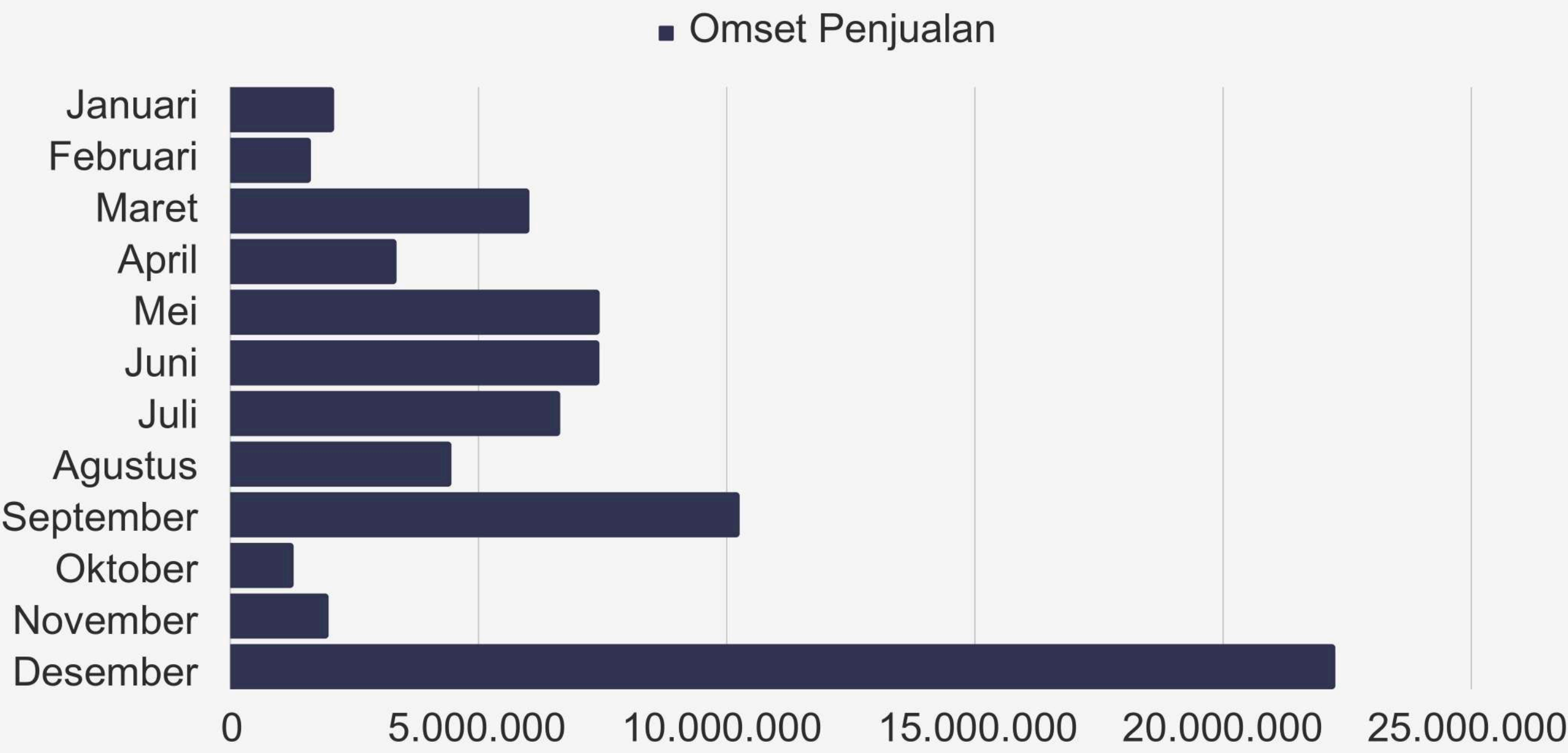




### 3.3.4 BISNIS SOSIAL UNCORRUPTED

Salah satu inovasi ICW untuk mengembangkan variasi sumber pendanaan adalah dengan menjalankan bisnis sosial melalui pembuatan produk merchandise atas nama brand UNCORRUPTED.

Bisnis ini dijalankan dengan menjual produk gaya hidup yang sekaligus mengangkat nilai antikorupsi. Target pasar dari produk ini adalah anak muda yang punya semangat dalam melakukan pembelaan sosial, ingin menjadi aktivis dan mencari cara dukungan yang mudah serta sesuai dengan karakter mereka. Penjualan produk UNCORRUPTED selama tahun 2022 mampu memberikan omset senilai Rp 74.706.823. Berikut tren omset penjualan produk UNCORRUPTED.





Penggalangan dukungan publik yang dilakukan selain bertujuan memperkuat ketahanan finansial, juga untuk menjaga independensi dan keberpihakan kepada rakyat sebagai korban korupsi. Kami percaya dukungan publik tidak akan surut dan itu akan menjadi bahan bakar bagi ICW untuk terus berkarya, berinovasi dalam kerja- kerja advokasi antikorupsi.

”**Mendukung gerakan Antikorupsi menjadi sangat penting dan bukan hanya sekedar program, karena masih banyak yang menganggap korupsi adalah hal yang lumrah, ini tentunya sangat berbahaya bagi negara.**”

**Karyaningsih - Sahabat ICW**

Penjualan merchandise Uncorrupted  
Sumber: Dokumentasi ICW





4.

**MEMBANGUN**  
**JEJARING**   
**ANTI KORUPSI**



## 4.1 PEREMPUAN MELAWAN KORUPSI

Meski korupsi merupakan kejahatan yang tidak mengenal jenis kelamin, korupsi diyakini telah memperparah ketimpangan gender dan menempatkan perempuan sebagai korban utama. Berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerugian secara langsung. Di sisi lain, perempuan mempunyai peran strategis melawan korupsi berkaitan dengan peran perempuan dalam ranah domestik maupun penggerak beragam komunitas di tengah masyarakat.

Melihat dekatnya irisan persoalan yang dihadapi perempuan dengan korupsi dan strategisnya peran perempuan melawan korupsi, ICW menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) perempuan. Bekerjasama dengan Yayasan Sikola Mombine, SAKTI Perempuan diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Kota Palu dipilih mengingat pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2018 terdapat banyak agenda pemerintah untuk pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Agenda tersebut tentu perlu pengawalan publik agar lebih bersih dari korupsi dan berperspektif gender.



Peserta Sekolah Antikorupsi perempuan, Palu, Sulawesi Tengah  
Sumber: Dokumentasi ICW



Melalui serangkaian proses seleksi, dari 67 peserta yang mendaftar, terpilih 15 perempuan muda yang kemudian belajar bersama mengenai perencanaan anggaran yang berperspektif gender, mengawal pengadaan barang/ jasa, hingga mengenai strategi kampanye antikorupsi. Harapannya, peserta SAKTI perempuan menjadi agen-agen baru untuk menyebarkan semangat, nilai, dan gagasan antikorupsi serta pemenuhan hak-hak perempuan.

### 4.2 PENGUATAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

Laporan penindakan kasus korupsi ICW menunjukkan

**31% KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 2016 TERJADI DI 2021 SEKOLAH**

Fakta ini tentu mengkhawatirkan karena dapat menghambat pemenuhan pelayanan pendidikan di sekolah dan membuat generasi penerus permisif terhadap korupsi.

ICW meyakini bahwa pengelolaan anggaran sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dapat menjadi salah satu strategi melawan korupsi di sekolah. Pengelolaan anggaran yang terbuka juga dapat membuat anggaran lebih tepat dibelanjakan dan meningkatkan kepercayaan warga sekolah terhadap sekolah.

Untuk mendorong pembenahan pengelolaan anggaran di sekolah, ICW sejak April 2022 bersama dengan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) melakukan pendampingan pengelolaan anggaran sekolah atau yang dikenal dengan Rencana





Pendampingan orang tua siswa, komite sekolah dan guru SDN 05 Kampung Sawah  
Sumber : Dokumentasi ICW

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini dilakukan atas dasar kenyataan jika RKAS seringkali hanya disusun oleh kepala sekolah dan bendahara. Praktik tertutup ini membuat warga sekolah sulit melakukan pengawasan.

Sebagai uji coba, kegiatan pendampingan dilakukan di SDN Kampung Sawah 05 Kabupaten Bogor. Pendampingan diawali serangkaian kegiatan diskusi bersama dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan wali murid. Topik diskusi seputar mimpi bersama atas sekolah yang maju dan bermutu, kemudian berlanjut pada penyusunan anggaran sekolah yang lebih partisipatif dan transparan.

Bisa dikatakan untuk kali pertama sekolah ini menyusun anggarannya secara partisipatif. Tentu hasil belum bisa dirasakan langsung karena pendampingan masih akan berlanjut pada 2023. Namun demikian ada langkah maju karena sekolah berkomitmen membuat SOP keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel.



## 4.3 KERJA SAMA AKADEMI ANTIKORUPSI DENGAN LLDIKTI

Akademi Antikorupsi merupakan platform pembelajaran antikorupsi secara daring yang dimiliki ICW. Upaya untuk menjangkau pengguna terus dilakukan dimana selama tahun 2022 telah mengalami penambahan sebanyak 2.407 pengguna, sehingga totalnya mencapai 14.954 pengguna dengan jumlah kelulusan lebih dari 50%.

**1.219**



### Latar Belakang Peserta

**356**



**ASN**

**120**



**Aktivis**

**1.205**



**Mahasiswa**

**224**



**Masyarakat**

**1.188**



**230**



**Pelajar**

**269**



**Swasta**

**3**



**TNI/Polri**

MoU dengan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara  
Sumber: Dokumentasi ICW





Pada tahun 2022, ICW memperluas penggunaan Akademi Antikorupsi ke Perguruan Tinggi di Sumatera Utara dan berhasil melakukan MoU dengan STIE Eka Prasetya Medan. Serta bekerjasama dengan LLDIKTI I Wilayah Sumatera Utara untuk lebih menjangkau Perguruan Tinggi Swasta lain.

Khusus untuk wilayah Ibukota, ICW juga telah berhasil mendorong LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta dengan menerbitkan surat edaran dari LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta kepada Perguruan Tinggi swasta yang ada di DKI Jakarta untuk mengikuti perkuliahan antikorupsi melalui Akademi Antikorupsi.

”Tingkat tertinggi dari kerjasama adalah saling mengisi keterbatasan untuk mencapai tujuan dan dampak bersama yang lebih besar. Kolaborasi nyata tergambar dari konsistensi kontribusi tiap pihak yang berjalan mengalir dengan sangat natural. Itulah yang kami rasakan selama bekerjasama dengan ICW melalui berbagai program advokasi dan pembelajaran antikorupsi.”

Trisno Sakti Herwanto  
Kepala Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Parahyangan



Tidak lupa ICW juga terus berupaya menambah materi pembelajaran di Akademi Antikorupsi. Pada 2022, ICW telah menambahkan 2 mata kuliah baru, yaitu Advokasi Pelayanan Publik dan Perempuan Antikorupsi. Sehingga sampai saat ini mata kuliah di Akademi Antikorupsi secara keseluruhan mencapai 21 mata kuliah.

Untuk menyongsong program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal program Merdeka Belajar, Akademi Antikorupsi juga berhasil menyelesaikan buku panduan Merdeka Belajar Kelas Merdeka (MBKM) yang dilakukan bekerja sama dengan Prodi Administrasi Publik Universitas Parahyangan Bandung. Program MBKM sebanyak 20 sks ini akan dilakukan dalam bentuk kuliah di Akademi Antikorupsi, riset/ penelitian, advokasi dan kuliah kerja nyata.

Hal ini merupakan bagian dari memaksimalkan pendidikan antikorupsi dan mengembangkan sistem pendidikan serta kerjasama Akademi Antikorupsi dengan berbagai elemen, khususnya perguruan tinggi.



Kerjasama ICW dengan Universitas Parahyangan dalam program MBKM  
Sumber: Dokumentasi ICW



## 4.4 HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Bagi ICW, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dimaknai sebagai refleksi dan sarana konsolidasi untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Pada tahun 2022, ICW mengusung tema Hakordia "Suara Rakyat Melawan Korupsi". Pilihan tema ini diangkat berdasarkan perkembangan situasi politik-hukum yang stagnan bahkan cenderung terpuruk, sehingga upaya perlawanan rakyat harus makin solid dan kuat.

### UNCORRUPT-FEST 2022

Rangkaian agenda Uncorrupt Fest 2022 terdiri dari pameran karya infografis dan foto terkait hasil kerja ICW, Ngobrol Santai Antikorupsi, diskusi publik, gelar wicara, musik, stand up comedy, dan pameran karya seni lawan korupsi.

Acara ini melibatkan komunitas, aktivis, akademisi, pegiat organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Seluruh rangkaian tersebut diselenggarakan luring di KALA di Kalijaga, Jakarta Selatan, dan juga secara daring melalui YouTube dan Instagram ICW, 9 – 11 Desember 2022.

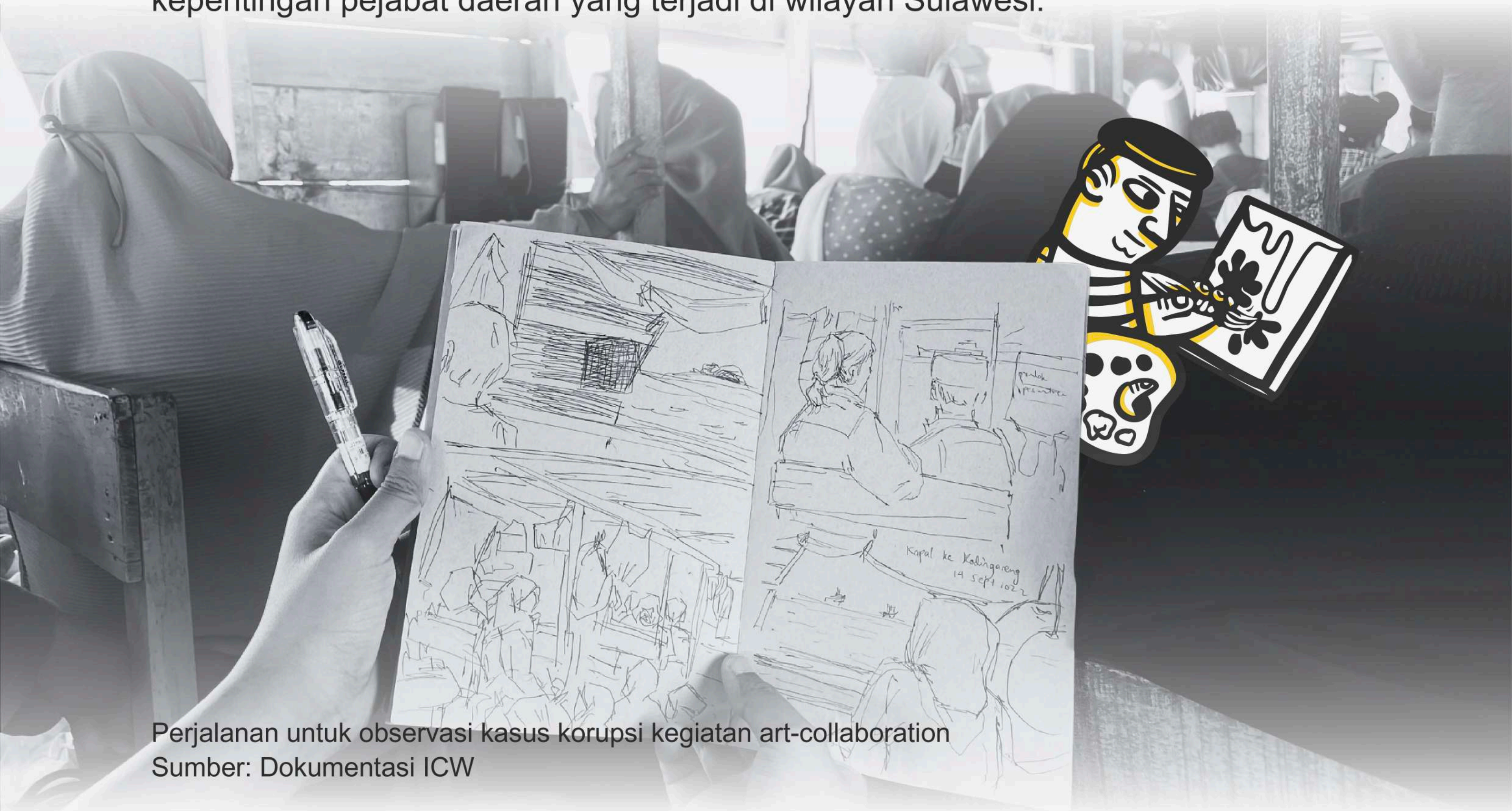


Pameran komik karya komikus kolaborator ICW  
Sumber: Dokumentasi ICW



## 4.5 KOLABORASI SENI LAWAN KORUPSI

Merupakan kegiatan yang melibatkan seniman dalam kampanye antikorupsi. Seniman yang terlibat berlatar belakang komikus perempuan yang tidak hanya menampilkan karya perjuangan kesetaraan gender juga mengkampanyekan perempuan sebagai aktor pemberantasan korupsi, konflik lahan adat, dan konflik kepentingan pejabat daerah yang terjadi di wilayah Sulawesi.



Perjalanan untuk observasi kasus korupsi kegiatan art-collaboration  
Sumber: Dokumentasi ICW

Proses Kolaboasi ICW bersama tiga orang komikus perempuan dimulai dari tahap menyusun rencana, diskusi pendalaman isu, observasi lapangan, hingga penulisan dan produksi konten kampanye antikorupsi.



Ketiga orang seniman muda yang terlibat adalah Adelia Maghfira (@maghfirare), Nadiyah Suyatna (@nadiyahsuyatna), dan Bivi Q (@alivegurl).

Karya para komikus dihasilkan dalam bentuk komik strip, dengan total sebanyak 24 panel karya. Seluruh karya seni itu kemudian di pameran dalam rangkaian Hakordia 9 - 11 Desember 2022 dan dipublikasikan di media sosial ICW dan para seniman.

## **4.6 ANUGERAH KARYA JURNALISTIK ANTIKORUPSI (AKJA)**

AKJA 2022 merupakan bentuk apresiasi bagi jurnalis yang telah menghasilkan karya jurnalistik dalam membongkar skandal kejahatan dan dugaan korupsi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, AKJA kali ini digelar khusus untuk karya jurnalistik yang dihasilkan dari regional Aceh, Sumatera Utara, Banten, dan NTT.

Kerja-kerja investigasi jurnalistik tentu tidak mudah dan penuh tantangan serta konsistensi dalam menggelutinya. Sehingga apresiasi dalam bentuk penghargaan diharapkan menjadi stimulan untuk terus konsisten melahirkan lebih banyak laporan investigasi khususnya terkait laporan korupsi di daerahnya masing-masing.

Pada AKJA 2022, jumlah karya yang dikompetisikan sebanyak 62 artikel yang berasal dari 4 daerah. Karya-karya tersebut dinilai oleh juri yang terdiri dari perwakilan ICW, AJI, YLBHI, dan Project Multatuli. Hasilnya, terpilih satu pemenang karya terbaik dan satu pemenang terfavorit untuk setiap daerah yang diumumkan dalam acara penganugerahan AKJA 2022 secara luring di Banda Aceh, dan daring melalui YouTube ICW. Para pemenang AKJA 2022 yakni:



-  Pemenang Kategori **Karya Jurnalistik Antikorupsi Terbaik** merupakan **anggota KJI Banten** yang diwakili Rasyid Ridho dengan judul karya, “Membongkar Praktik Titip Menitip Siswa di Banten Seret Nama Anggota DPRD Hingga Camat”
-  Pemenang Kategori Karya Jurnalistik Antikorupsi **Terfavorit Sumatera Utara** adalah **anggota KJI Sumatera Utara** dengan judul laporan “Beda Merek Lelang Proyektor Kota Medan”
-  Pemenang Kategori Karya Jurnalistik Antikorupsi **Terfavorit Aceh** yakni **anggota KJI Aceh**, diwakili Iskandar dengan judul karya “Dugaan Korupsi Wastafel Rp 41,2 Miliar Disdik Aceh, Siapa Bermain?”
-  Pemenang Kategori Karya Jurnalistik Antikorupsi **Terfavorit Nusa Tenggara Timur** adalah **anggota KJI NTT** yang diwakili Jhon Seo dengan judul karya “Program Janggal Bedah Rumah Warga Miskin Kupang”
-  Pemenang Kategori Karya Jurnalistik Antikorupsi **Terfavorit Banten** yakni Diebaj Ghuroofie dengan judul karya “Honorer Siluman Tertutup Kasak Kусuk (Banten Pos)”





Penyerahan penghargaan Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi

Sumber: Dokumentasi ICW

## Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi

Regional Aceh, Banten, NTT, Sumatera Utara



**Pembentukan klub jurnalis investigasi di berbagai kota di luar Jakarta telah meningkatkan sensitivitas dan kemampuan jurnalis serta organisasi masyarakat sipil dalam mengangkat isu-isu korupsi di daerah mereka, yang pada gilirannya mendorong transparansi dan akuntabilitas di daerah tersebut. Program ini perlu dilakukan di lebih banyak daerah di Indonesia!**

**Eric Sasono**  
Pimpinan Internews di Indonesia



5.

**ADVOKASI**  
**KEBIJAKAN**  
**ANTI KORUPSI**

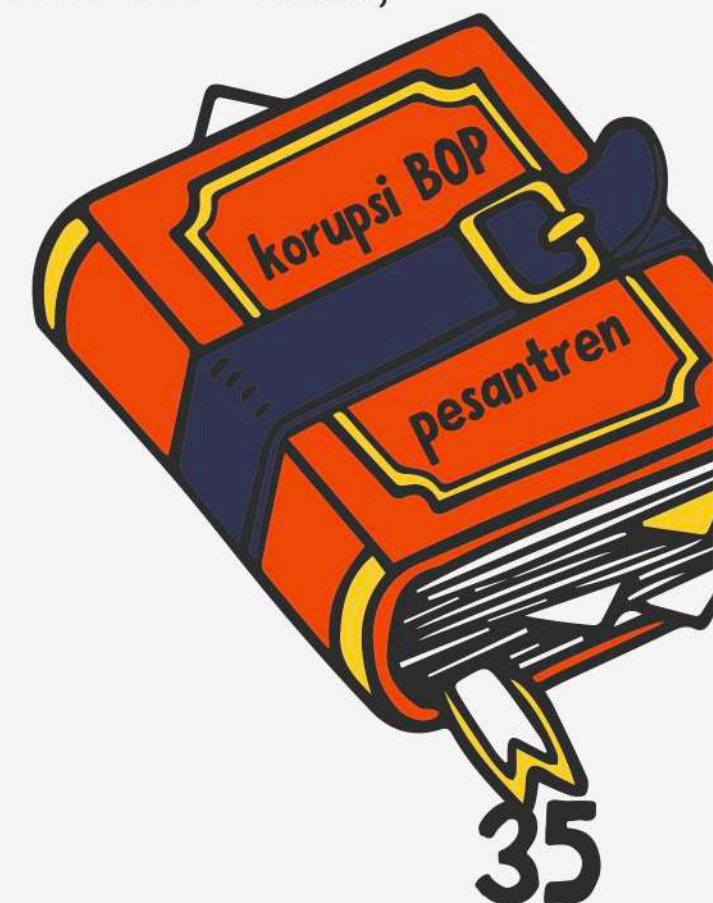


## 5.1 PRAKTIK LANCUNG DANA BOP PESANTREN DI PROVINSI ACEH, SUMATERA UTARA, JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, DAN BANTEN

Pada tahun 2022, ICW meluncurkan laporan hasil pemantauan terhadap program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari anggaran yang dikelola Kementerian Agama tahun anggaran 2020. Bantuan sebesar Rp 2,599 Triliun diperuntukan bagi 21.173 Pondok Pesantren yang terdampak Pandemi Covid 19 agar tetap dapat beroperasi sebagai penyelenggara layanan pendidikan Islam. Namun, sengkabut tata kelola distribusi bantuan yang buruk membuat distribusi bantuan berpotensi menjadi lahan bancakan pihak-pihak tertentu.

Hal ini terkonfirmasi, dari hasil pemantauan ICW bersama jaringan masyarakat sipil di lima provinsi, yakni, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Pemantauan tersebut berhasil mengungkap adanya berbagai bentuk penyimpangan dalam penyaluran BOP. Melalui penelusuran data secara digital, observasi lapangan, serta wawancara beberapa informan penyelenggara di Pondok Pesantren, didapati sejumlah temuan penting dimana terdapat kekacauan dalam proses pendataan pesantren penerima bantuan. Misalnya data pesantren tidak akurat, klasifikasi pesantren penerima bantuan yang tidak cocok dengan profilnya, pesantren dengan nama dan alamat ganda, dan pesantren fiktif, ditemukan di lima daerah tersebut.

Selain itu, praktik pemotongan oleh pihak ketiga sebesar 40%-50% dari total nilai bantuan diakui oleh para informan. Kemudian ditemukan politisasi bantuan tepatnya di Provinsi Banten oleh anggota DPR RI dan pejabat lokal yang memanfaatkan proses penyaluran bantuan sebagai ajang menarik simpati masyarakat.



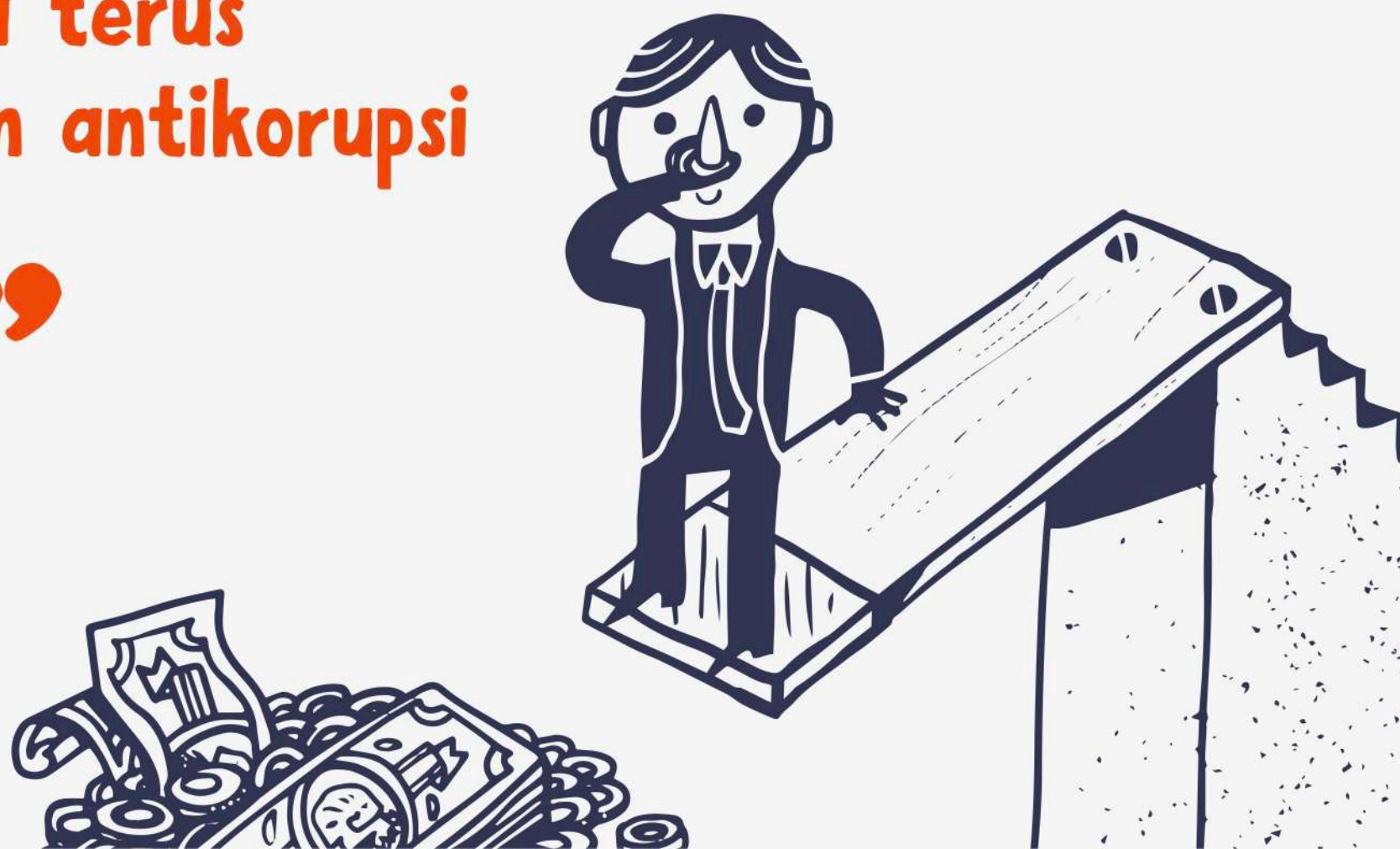


Hasil laporan pemantauan tersebut kemudian disampaikan kepada Inspektorat Kementerian Agama secara langsung agar ada upaya pemeriksaan lanjutan terhadap praktik-pratik penyimpangan BOP Pesantren diberbagai daerah. Hal ini penting mengingat program BOP Pesantren tetap berlanjut meski sudah tidak lagi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

ICW mendorong agar Inspektorat dapat segera mengusut sejumlah pihak di seluruh jajaran Kementerian Agama baik pusat maupun daerah yang diduga terlibat dalam proses pemotongan bantuan. Selain itu mendorong Kementerian Agama untuk membenahi sejumlah celah dalam proses distribusi bantuan khususnya soal kekacauan pendataan pesantren yang layak menerima.

” **Akar korupsi adalah pencucian uang. Pembiaran pencucian uang adalah pembiaran koruptor untuk menikmati harta ilegalnya. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan selalu mendukung penuh ICW sebagai episentrum kesadaran publik guna terus mensinergikan gerakan antikorupsi dan pencucian uang** ”

**Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.  
Kepala PPATK**





## 5.2 DIGITALISASI SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN WARGA

Perkembangan teknologi yang makin pesat sedikit banyak telah mendorong perubahan perilaku sosial. Kecepatan untuk mendapat informasi termasuk makin terhubungnya masyarakat akibat digitalisasi berbagai sarana komunikasi dan informasi menjadi potensi memperkuat peran masyarakat dalam memantau implementasi kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah, termasuk sektor pengadaan barang/jasa.

Salah satu dampak positif dari digitalisasi informasi adalah terkuaknya rencana DPR RI untuk membeli gorden bagi 505 rumah dinas dengan pagu Rp 48,75 miliar. Awal mula polemik itu karena rencana pembelian gorden dalam sistem informasi rencana umum pengadaan milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2022.

Atas dasar temuan tersebut ICW mendesak agar Sekretariat Jenderal DPR RI segera menghentikan proses pengadaan yang pada saat itu masih dalam proses seleksi penyedia. Proses pembelian gorden berpotensi menimbulkan kecurangan karena terdapat indikasi jika calon pemenang telah mengarah pada pihak tertentu. Musababnya dari 3 perusahaan yang memasukan penawaran, hanya



ada 1 perusahaan yang memenuhi syarat kualifikasi. Sehingga patut diduga proses pengadaan yang sedang berjalan saat itu hanya formalitas belaka. Apalagi kemudian ditemukan informasi jika harga gorden terindikasi tidak sesuai standar karena terlampau mahal hingga 4 kali lipat.

Kampanye untuk mendesak DPR menghentikan pembelian gorden semakin besar disuarakan oleh berbagai kalangan, sehingga pengadaan gorden dibatalkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **5.3 PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PENGADAAN**

Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah memiliki peran yang vital untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran baik administratif maupun pidana. Atas perannya tersebut ICW memandang sangat strategis untuk memperluas dan memperkuat fungsi pengawasan inspektorat misalnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik.

Oleh sebab itu, pada 2022 ICW bersama jaringan daerah yakni YASMIB dan Bengkel APPeK membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Inspektorat Kabupaten Maros dan Inspektorat Kota Kupang sebagai upaya memperkuat pengawasan internal. Tidak itu saja, kami juga berbagi pengetahuan mengenai penggunaan opentender.net terhadap 30 orang pegawai Inspektorat di Kabupaten Maros dan Kota Kupang untuk dapat memantau potensi kecurangan pengadaan.

Proses kolaborasi terus berlanjut dengan menyusun rencana kerja bersama untuk mengawasi proyek pengadaan yang telah selesai dilakukan. Harapannya,



dengan adanya kolaborasi pemantauan antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan dan mereduksi terjadinya potensi korupsi di kemudian hari.

Perjanjian Kerja Sama dengan Inspektorat Kabupaten Maros  
Sumber: Dokumentasi ICW







Bahwa Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Inspektorat Kota Kupang sangat berterima kasih kepada ICW dan Bengkel APPeK yang telah bekerja sama sebagai mitra dalam misi pencegahan korupsi khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pemerintah Kota Kupang sangat meyakini bimtek pengadaan barang/jasa Pemerintah sangat memberikan nilai positif bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan. Nilai-nilai positif dimaksud adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas APIP sebagai sebagai pejabat fungsional auditor maupun pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah yang dituntut menjadi "Quality Assurance" jaminan kualitas pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi serta pengawasan lainnya agar sesuai ketentuan berlaku



Frengky Amalo, S.Sos., MM.  
Inspektur Daerah Kota Kupang





## 5.4 LAPORAN MALADMINISTRASI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Pada pertengahan tahun 2022, ICW bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas dugaan maladministrasi dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Ada sejumlah prinsip dasar dalam proses itu yang disinyalir dilanggar, diantaranya, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Selang satu bulan kemudian, tepatnya 19 Juli 2022, Ombudsman kemudian mengeluarkan putusan yang pada intinya mengkonfirmasi tindakan maladministrasi dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Terdapat tiga bentuk maladministrasi yang dilakukan Mendagri, yakni, penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan, penyimpangan prosedur saat mengangkat pejabat kepala daerah dari unsur TNI aktif, dan mengabaikan kewajiban hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa perlu adanya peraturan teknis pengangkatan pejabat kepala daerah.



Pelaporan Mendagri ke ORI  
Sumber: Kompas/Prayogi Dwi Sulistyio



6.

# PENGHARGAAN ICW



  
INSTITUT  
FUNDRAISING  
INDONESIA

**INDONESIA  
FUNDRAISING  
AWARD  
2022**

DIBERIKAN KEPADA

**ICW**

SEBAGAI PEMENANG  
FUNDRAISING UNTUK AD...



# KITA ANTI KORUPSI

Pada tahun 2022 Institut Fundraising Indonesia (IFI) memberikan penghargaan kepada ICW sebagai Organisasi Masyarakat Sipil dengan kegiatan penggalangan dana publik untuk kategori advokasi terbaik. IFI sendiri adalah sebuah lembaga yang misinya antara lain mendorong kemandirian Indonesia melalui kemitraan fundraising agency dan membangun jaringan lembaga sosial untuk program pembangunan berkelanjutan.

ICW tentu saja merasa terhormat mendapatkan kepercayaan meraih penghargaan kategori advokasi terbaik. Pasti penghargaan ini menambah semangat baru bagi ICW yang tengah membangun strategi baru pasca pandemi Covid-19.



# LAPORAN AUDIT KEUANGAN ICW

Sehubungan dengan masih berjalannya proses audit, maka laporan keuangan ICW 2022 akan kami sampaikan melalui laman website

**[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)**





A large graphic of stylized tree roots. The roots are black on the left side of the page and white on the right side, which has an orange background. The roots spread out from the top center towards the bottom corners.

# INDONESIA CORRUPTION WATCH

LAPORAN  
AKHIR  
TAHUN 2022

Jl. Kalibata Timur 4D  
No. 6, RT.10/RW.08,  
Kalibata, Kec. Pancoran,  
Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta 12740